

**ANALISIS PENERAPAN INSENTIF PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG  
PEMERINTAH SEHUBUNGAN DENGAN  
*COVID-19* PADA PT.XYZ TAHUN 2021**



**DISUSUN OLEH:**

**MICHELLE MEDELINE**

**125180151**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

**JAKARTA**

**2022**

## Pengesahan

Nama : MICHELLE MEDELINE  
NIM : 125180151  
Program Studi : AKUNTANSI BISNIS  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21  
Ditanggung Pemerintah Sehubungan Dengan Covid-19  
Pada PT. XYZ Tahun 2021  
Title : Analysis Of The Implementation 21 Income Tax Incentives  
By The Government In Connection With Covid-19 at PT.  
XYZ Year 2021

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi  
AKUNTANSI BISNIS Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Tarumanagara pada  
tanggal 18-Juli-2023.

### Tim Penguji:

1. LINDA SANTIOSO, S.E., M.Si., Ak.
2. PURNAMAWATI HELEN WIJAYA, Dra., M.Si.
3. I CENIK ARDANA, Drs., MM., Ak., CA.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

### Pembimbing:

PURNAMAWATI HELEN WIJAYA, Dra.,  
M.Si.  
NIK/NIP: 10192048



---

Jakarta, 18-Juli-2023  
Ketua Program Studi

HENDRO LUKMAN, Dr. SE,MM,Akt,CPMA, CA,CPA (Aust.)

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Permasalahan

#### a. Latar Belakang Masalah

Dunia saat ini sedang dilanda pandemi virus yang dikenal sebagai *Novel Coronavirus Disease 19* atau lebih umum dikenal dengan *Covid-19*. *World Health Organization* (WHO) mengatakan *Covid-19* telah menjadi pandemi global sejak 2020. Pandemi *Covid-19* telah mempengaruhi kehidupan ekonomi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Banyak perusahaan dan pengusaha UMKM terkena dampak *Covid-19*.

*World Health Organization* (WHO) menjelaskan bahwa pandemi *Covid-19* bisa menyebabkan penyakit dari flu dan batuk biasa hingga penyakit yang lebih serius, seperti sesak nafas, sakit kepala yang berlebihan, bahkan bisa terkena infeksi paru-paru. Penyebaran *Covid-19* sudah menyebar luas ke seluruh dunia, yang menyebabkan banyak efek samping pada sistem ketatanegaraan, terutama pada perekonomian di Indonesia.

Menurut Nurma Midayanti, 82,55% pelaku usaha yang telah disurvei mengalami penurunan pendapatan. Salah satu faktor yang menyebabkan penurunan pendapatan ini adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang di tetapkan oleh pemerintah. Ini adalah salah satu penyebab penurunan kegiatan produksi karena permintaan masyarakat yang tidak mencukupi dan banyak juga karyawan yang di putuskan hubungannya (PHK).

Seiring dengan menurunnya perekonomian di Indonesia, konsumsi rumah tangga atau daya beli masyarakat semakin merendah yang memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian di Indonesia. Pemerintah tidak tinggal diam dalam masalah ini, salah satu hal yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan konsumsi masyarakat Indonesia adalah dengan memberikan Insentif pajak.

Untuk memperlancar penerimaan pajak di masa pandemi *Covid-19* ini, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 (PMK No.23/PMK.03/2020) tentang Insentif Pajak bagi Wajib Pajak yang terkena dampak wabah *Covid-19* dan telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149 Tahun 2021 (PMK No.149/PMK.03/2021).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 selama masa pandemi *Covid-19*. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Sehubungan Dengan *Covid-19* Pada PT.XYZ Tahun 2021”.

#### **b. Identifikasi Masalah**

Dunia yang saat ini sedang dilanda oleh pandemi virus *Covid-19* yang membuat banyak sekali masyarakat yang kehilangan pekerjaannya dan tidak mendapatkan penghasilan. Hampir di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, terkena dampak yang sangat signifikan dari pandemi *Covid-19* ini terutama pada ranah perekonomian. Oleh karena itu, untuk mendorong kenaikan pada sistem perekonomian di Indonesia, pemerintah memberikan Insentif pajak.

Untuk melancarkan keinginan pemerintah dengan memberikan Insentif pajak ini, pemerintah membuat beberapa peraturan baru tentang Insentif pajak. Ada beberapa peraturan baru yang di buat oleh pemerintah berkaitan dengan Insentif yang akan di bahas dalam laporan ini, yaitu Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Covid-19*, Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, dan yang terakhir Tentang Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Covid-19*.

Pada penelitian ini, peneliti mengambil data dari PT.XYZ yang akan di analisis untuk perhitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah. Peneliti telah memilih secara acak pegawai yang akan di analisis untuk perhitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan yang mendapatkan

Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah.

**c. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa hal yang perlu di perhatikan agar penelitian ini mendapatkan hasil yang terbaik. Penelitian ini akan di batasi pada Perusahaan Manufaktur, yaitu PT.XYZ. Peneliti akan menggunakan data perhitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada tahun 2021. Peneliti juga menggunakan laporan keuangan untuk jurnal pencatatan gaji karyawan selama tahun 2021. Peneliti juga akan menggunakan bukti pelaporan yang di tanggung oleh pemerintah dan surat dari Kantor Pelayanan Pajak yang menunjukkan bahwa PT.XYZ adalah perusahaan yang di tanggung oleh pemerintah.

**d. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah diungkapkan beserta identikasi dan pembatasannya, rumusan masalah dalam penelitian ini salah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakan tata cara perhitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah di PT.XYZ tahun 2021?
- 2) Apakah tata cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT.XYZ sudah sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016?
- 3) Apakah tata cara perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT.XYZ sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 (PMK No.23/PMK.03/2020) yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No.149 Tahun 2021 (PMK No.149/PMK.03/2021)?

## **B. Tujuan dan manfaat**

### **a. Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui tata cara perhitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah di PT.XYZ tahun 2021.
- 2) Untuk mengetahui tata cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT.XYZ sudah sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016?
- 3) Untuk mengetahui tata cara perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT.XYZ sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 (PMK No.23/PMK.03/2020) yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No.149 Tahun 2021 (PMK No.149/PMK.03/2021)?

### **b. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini, peneliti berharap bisa memberikan manfaat untuk informasi tambahan kepada PT.XYZ agar dapat melakukan perhitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam peraturan perpajakan.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat sebagai referensi dan informasi tambahan kepada peneliti lain yang akan meneliti tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah.